

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rahman Ghozalim, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003),
hlm.46

Amiur, *Hukum*, 43; Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta:
Sinar Grafika, 1995)

Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam
Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994). Hlm. 54.

Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),
cet.ke-3, edisi ke-2, h.456

Mediya Rafeldi (Di Himpun) *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang
Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji* (Jakarta: Alike, 2016) hal 2.

Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
16.

Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam
Perkawinan*, Jakarta, PT RajaGrafindo,hlm.42

Saeful Anwar, “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN ATAS
KEHENDAK ORANG TUA*,” Proceedings of the National Academy of
Sciences 3, no. 1 (2015): 1–15.

Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*,
Jakarta, Sinar Grafika, hlm.32.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid 2, Bulan Bintang, Jakarta, 1997, hlm. 398.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2018). Hlm. 221-222.

REGULASI

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____. *Kompilasi Hukum Islam*

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

_____. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2000*

_____. *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009*

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994*

_____. *Undang-Undang Pengadilan Agama*

_____. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021*

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun Peraturan Pemerintah tersebut juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

SURAT EDARAN

_____. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

_____. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.99-6/99

JURNAL

Dariyo, Agoes. "*MEMAHAMI PSIKOLOGI PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA.*" 2 (2004), 7

Fauzi Salim, Rahmad. "*Pemberian Izin Perceraian Untuk PNS Menggunakan Teori Maslahat.*" *Rayah Al-Islam* 6, no. 2 (2022), 247-260.
doi:10.37274/rais.v6i2.573.

Frankl. E. V. *Man's search for meaning: An introduction to logotherapy.* (New York: Washington Square Press.1963.) 76

Hasbi, Faisal Ahmadi, and Muhammad Randhy Martadinata. "*FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KOTA JAMBI.*" 2021

Rahman, Fawait S. "*Analisis Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.*" *MOMENTUM : Jurnal Sosial dan Keagamaan* 7, no. 1 (2019), 35-58.
doi:10.29062/mmt.v7i1.15.

Rizqullah, Muhammad S., and Imanuddin A. Fida. "*AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PNS BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 jo PP NOMOR 45 TAHUN 1990.*" *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022), 68-79. doi:10.46773/usrah.v3i1.473.

Rofi'i, Hilmi Y., H. M. Zaki, Liky Faizal, and Abd. Qohar. "*Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai*

Negeri Sipil." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022), 93-104. doi:10.37680/almanhaj.v4i1.1576.

Suadnyana, I. N. "*PERKAWINAN DITINJAU DARI ASPEK SOSIAL, HUKUM DAN AGAMA HINDU.*" *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 6, no. 1 (2022), 27. doi:10.55115/pariksa.v6i1.2236.

Suisno, Suisno. "*TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK ADA IZIN PEJABAT ATASAN LANGSUNG.*" *Jurnal Independent* 4, no. 2 (2016), 8. doi:10.30736/ji.v4i2.57.

Tien Ramadhanty, Nindya, Djanuardi D, and Eidy Sandra. "*Perkawinan Siri Pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.*" *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (2020), 83. doi:10.35706/positum.v5i1.3483.

Yulita, Maya. "*Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.*" 3 (2020), 20.